

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu daerah dapat menjadi tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Untuk meningkatkan dan membangun kesejahteraan masyarakat, Pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang no.32 tahun 2004 diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonom oleh tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengelola sendiri keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab (Untary, 2015)

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan harus bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah dalam menjalankan setiap kegiatannya tersebut harus terencana dan terkontrol dengan baik agar penggunaan keuangan dalam setiap kegiatannya tidak berlebihan. Maka dari itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam pemerintah daerah tersebut, agar tujuan pemerintah daerah secara efektif dan efisien dapat tercapai dengan perencanaan dan pengendalian yang baik dalam menjalankan setiap kegiatannya (Tresnawati, 2012). Pemerintah daerah yang merupakan wakil pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,

harus mempertanggung jawabkan setiap hasil kerjanya kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerahnya sendiri juga bagi pemerintah pusat.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat memiliki tugas untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan yang tinggi terhadap organisasi sektor publik tersebut. Tetapi, dengan banyaknya kasus yang muncul di media cetak maupun di media elektronik mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara membuat tingkat harapan dan kepercayaan masyarakat semakin menurun.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat seharusnya dapat menggambarkan hasil kinerja pemerintah yang sebenarnya dan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat harus dapat diandalkan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan setiap tugasnya dibantu oleh banyak dinas, salah satunya adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas dari dinas tersebut adalah menerima dan mengelola kas serta asset daerah yang ada di wilayahnya. Kas yang diterima dari berbagai pihak termasuk masyarakat ini nantinya digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan setiap program kerja yang telah dibuat. Sehingga dalam kegiatan penerimaan kas ini, pemerintah perlu meningkatkan pengendalian internal agar laporan yang diberikan kepada pemerintah pusat dan masyarakat dapat diandalkan kebenarannya.

Sejauh ini penelitian yang membahas tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan belum banyak dilakukan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas pengaruh sistem pengendalian intern terhadap salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang dilakukan penulis diberikan judul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal penerimaan Kas terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern penerimaan kas di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sudah diterapkan secara memadai?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern penerimaan kas berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektifitas penerapan Sistem Pengendalian Intern penerimaan kas di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas terhadap keandalan Laporan Keuangan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah daerah dan dinas terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah serta dinas terkait dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

b. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi para akademisi dalam pengembangan dan penerapan teori yang didapat dengan penerapannya dalam praktek di lapangan.

c. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan wawasan bagi pembacanya dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

